



## **BUPATI TOJO UNA-UNA**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 15 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN KELURAHAN UEMALINGKU DI KECAMATAN AMPANA KOTA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pemerataan pembangunan perlu membentuk kelurahan pada Lingkungan III Kelurahan Uentanaga Atas;
  - b. bahwa lingkungan III memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi kelurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Uemalingku di Kecamatan Ampana Kota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11), Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2010 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 25);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**dan**

**BUPATI TOJO UNA-UNA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN  
UEMALINGKU KECAMATAN AMPANA KOTA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Daerah Otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan kota.

8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
10. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih.
11. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

## **BAB II PEMBENTUKAN DAN IBU KOTA**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan Uemalingku Kecamatan Ampana Kota yang meliputi Lingkungan III, RT 13, RT 14, RT 15, RT 16 dan RT 17

### **Pasal 3**

Pusat Pemerintahan Kelurahan Uemalingku berkedudukan di Uemalingku

### **Pasal 4**

- (1) Jumlah kepala keluarga pada saat pembentukan Desa Uemalingku berjumlah 554 KK
- (2) Jumlah penduduk pada saat pembentukan Kelurahan Uemalingku berjumlah 2.671 jiwa

## **BAB III BATAS WILAYAH**

### **Pasal 5**

- (1) Luas Wilayah Kelurahan Uemalingku  $\pm 24 \text{ Km}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Uentanaga Atas
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumoli dan Desa Sabulira Toba
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pegunungan
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Ampana dan Sungai Sansarino
- (2) Luas dan batas Kelurahan Uemalingku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditegaskan dalam peta batas kelurahan.

### **Pasal 6**

- (1) Wilayah Kelurahan Uemalingku sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 semula merupakan bagian dari wilayah Kelurahan Uentanaga Atas
- (2) Dengan dibentuknya Kelurahan Uemalingku, maka wilayah Kelurahan Uentanaga Atas terdiri dari RT 1, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5, RT 6, RT 7, RT 8, RT 9, RT 10, RT 11, dan RT 12
- (3) Dengan terbentuknya Kelurahan Uemalingku, maka aset-aset pemerintahan yang bersumber dari kelurahan induk menjadi aset Pemerintah Daerah Kabupaten

### **Pasal 7**

Peta Wilayah Kelurahan Uemalingku akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana  
pada tanggal 12 April 2011

**BUPATI TOJO UNA-UNA,**

**TTD + CAP**

**DAMSIK LADJALANI**

Diundangkan di Ampana  
pada tanggal 13 April 2011

**Pit. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**Drs. SYAIFUL BAHRI. L**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19640110 199103 1 000

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2011 NOMOR 15